

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional (HI), sering disebut Studi Internasional (SI), adalah ilmu yang mempelajari hubungan antarnegara, termasuk peran negara, organisasi antarpemerintah (IGO), organisasi nonpemerintah internasional (INGO), organisasi non-pemerintah (NGO), dan perusahaan multinasional (MNC). HI merupakan bidang akademik dan kebijakan publik dapat bersifat positif atau normatif, karena keduanya berusaha menganalisis dan merumuskan kebijakan luar negeri negara-negara tertentu. HI sering dianggap sebagai cabang ilmu politik (khususnya setelah tata nama UNESCO tahun 1988), tetapi akademisi lebih suka menganggapnya sebagai bidang studi yang interdisipliner. Aspek-aspek hubungan internasional telah dipelajari selama ribuan tahun sejak masa Thucydides, tetapi baru pada awal abad ke-20 HI menjadi disiplin yang terpisah dan tetap. (Wikipedia, 2024)

Hubungan internasional adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Menurut K.J Holsti, istilah hubungan internasional senantiasa berkaitan dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat-masyarakat negara, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh negara-negara.

Pengertian atau makna hubungan internasional yang lain adalah tentang transaksi lintas batas dari semua jenis politik, ekonomi dan sosial, dan ilmu hubungan internasional juga mempelajari negosiasi perdagangan atau operasi dari institusi atau lembaga *non-state*. (Ikatan Arsitek Indonesia, 2022)

Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi antara aktor-aktor di luar negeri, termasuk negara-negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu. Hal ini mencakup studi tentang perang dan perdamaian, perdagangan dan investasi, diplomasi dan kerjasama, serta hak asasi manusia dan keamanan lingkungan. (Jackson & Sorensen, 2016)

Hubungan internasional adalah sebuah ilmu yang juga mempelajari sebab dan akibat dari hubungan antar suatu negara. Adanya hubungan antar negara dapat disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya antara negara yang berbeda. Hubungan ini terjadi akibat saling ketergantungan (interdependensi) untuk dapat memenuhi kebutuhan antara suatu negara dengan negara lain.

Secara umum, hubungan internasional adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefenisikan secara global untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah bersama. Namun ada juga beberapa definisi hubungan internasional yang dipaparkan oleh beberapa ahli.

1. Menurut McClelland: Hubungan internasional adalah sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan sosial tertentu dan juga termasuk studi yang membahas tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.

2. Menurut Drs. R. Soeprapto: Hubungan internasional merupakan sebuah spesialis yang mengintegrasikan beberapa cabang pengetahuan lain yang mempelajari segi-segi internasional tentang kehidupan sosial manusia.
3. Menurut J.C. Johari: Hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi antar negara di dunia yang berdaulat.
4. Menurut Coulombis dan Wolfe: Hubungan internasional adalah suatu fenomena yang terlihat dan dapat ditemukan variabel dasarnya untuk menemukan karakter hubungan di setiap negara.
5. Menurut Mochtar Mas'od: Hubungan internasional adalah hubungan yang begitu kompleks karena adanya keterlibatan bangsa yang berdaulat sehingga diperlukan mekanisme yang lebih rumit melebihi hubungan antar kelompok. (Humaira, N. 2023)

2.1.2 Hubungan Bilateral

Bilateral adalah hubungan antara dua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa *non-selfgoverning territory*. Negara-negara mitra kerjasama Indonesia ini terbagi dalam delapan kawasan (Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat, dan Eropa Tengah dan Timur). Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Berbagai forum, baik bilateral, regional maupun multilateral

telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat. (hubla.dephub.go.id, 2023)

Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral dan multilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran tumpang, dan kunjungan antara negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah hubungan multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya (*freewill*).

Hubungan bilateral atau multilateral juga berlaku untuk negara yang bekerjasama dengan sebuah organisasi besar dunia dalam berbagai bidang. Contoh: Seperti Indonesia dengan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Indonesia dengan OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC). Tidak menutup kemungkinan dimasa mendatang akan terjalin hubungan-hubungan baru.

Dari segi wilayahnya, kerja sama antarnegara dibedakan atas:

- a. Kerja sama regional, yaitu kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan satu rumpun. Misalnya kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
- b. Kerja sama Internasional, yaitu kerja sama yang dilakukan oleh julukan negara-negara di dunia tanpa mengenal batasan wilayahnya.

Berdasarkan jumlah anggotanya, kerja sama antarnegara dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut:

- a. Kerja sama bilateral, yaitu kerja sama yang dilakukan antar 2 negara saja.

- b. Kerja sama multilateral, yaitu bentuk kerja sama antarnegara yang dilakukan oleh beberapa negara yang jumlahnya lebih dari 2 negara. (Wikipedia, 2024)

Indonesia dan Australia memiliki hubungan bilateral yang kuat di bidang keamanan siber. Keduanya berkolaborasi melalui program "Dialog Kebijakan Siber" untuk berbagi informasi, praktik terbaik, dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi ancaman siber. Kerja sama ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan menangani kejahatan siber lintas batas, serta mendorong terciptanya ruang siber yang damai dan stabil. (Wikipedia, 2024)

2.1.3 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka, berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk kerjasama ini saling menguntungkan antara negara satu dengan negara yang lainnya kerjasama ini bisa bilateral maupun multilateral. Setiap negara memiliki kelebihan maupun kekurangannya, oleh sebab itu dengan adanya kerjasama antar negara satu dengan yang lainnya dapat saling menyalurkan kelebihan dan menutupi kekurangan.

Dengan demikian pembangunan di dalam suatu negara akan berjalan lancar dan dapat membangun potensi yang ada di dalam negeri. Secara sekilas itulah pengertian kerja sama internasional. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian kerja sama internasional. Berikut adalah pengertian kerja sama internasional menurut para ahli.

a. Perwita dan Yani

Perwita dan Yani mengemukakan kerja sama internasional merupakan sistem hubungan yang dibuat berdasarkan kehidupan internasional dan terbagi dalam berbagai macam bidang seperti bidang ideologi, ekonomi, sosial budaya, politik, lingkungan hidup, kesehatan, pertahanan serta keamanan. (Perwita, A. A. B., & Yani, M. Y. 2005)

b. Dougherty dan Pfaltzgraff

Kerja sama internasional menurut Dougherty dan Pfaltzgraff merupakan hubungan yang dijalin antar negara dan tidak ada unsur kekerasan maupun paksaan serta disahkan secara hukum internasional dalam upaya memberikan kebebasan untuk membangun negaranya sendiri.

c. Holsti

Holsti berpendapat bahwa kerja sama merupakan kolaborasi yang dilakoni oleh setiap negara ketika melihat ada masalah nasional yang terjadi di negaranya. Masalah tersebut dianggap perlu ditangani dengan baik karena dapat mengancam kesatuan dan persatuan negara, oleh karena itu negara berusaha menyelesaikan masalah dengan cara menjalin kerja sama dengan negara lain.

d. Charles Armor McClelland

Pengertian kerja sama internasional menurut Charles ia kemukakan melalui tulisannya berjudul *Theory and the International System* pada tahun 1966.

Pada tulisannya tersebut, Charles berpendapat kerja sama internasional merupakan segala bentuk interaksi yang ada antara masyarakat dengan negara-negara dan dilakukan oleh pemerintah maupun warga negaranya.

e. Koesnadi Kartasasmita

Koesnadi berpendapat bahwa kerja sama internasional merupakan akibat dari adanya hubungan internasional serta akibat dari bertambahnya hal kompleks dalam kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.

f. Willian D Coplin

William pun mengemukakan pendapatnya mengenai kerja sama internasional melalui tulisannya yang berjudul *Introduction to International Politics: A Theoretical Overview* (1971), menurutnya kerja sama internasional adalah sebuah kerja sama yang mulanya terbentuk melalui satu alasan yaitu negara ingin melakukan interaksi rutin yang baru serta baik untuk mencapai tujuan bersama.

g. Theodore A Coulombis dan James H Wolfe

Coulombis dan Wolfe mengemukakan bahwa kerja sama internasional merupakan hubungan internasional yang berupa interaksi antar warga dari suatu negara dengan negara lain. Pengertian tersebut Coulombis dan Wolfe kemukakan melalui tulisannya berjudul *Introduction to International Relations* pada tahun 1986. (Aris Yusuf, M. 2021)

Kerjasama internasional memiliki tujuan:

a. Mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara,

- b. Mencegah dan menghindari konflik yang terjadi,
- c. Memperoleh pengakuan kemerdekaan,
- d. Mempererat hubungan antar negara, diberbagai aspek dan bidang,
- e. Membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi,
- f. Menggali dan mengembangkan potensi masing-masing negara,
- g. Membantu membebaskan kemiskinan,
- h. Memajukan perdagangan dengan meningkatkan kemakmuran negara yang terlibat. (Juni Amanullah, 2021)

Negara-negara di dunia tidak dapat berdiri sendiri, negara-negara perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Setiap negara tidak memiliki sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi yang memadai. Adanya saling ketergantungan mengharuskan setiap negara melakukan kerjasama internasional. Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, mempercepat perkembangan ekonomi.

2.1.4 Kerjasama Keamanan

Kerjasama keamanan adalah usaha bersama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara, organisasi internasional, atau pihak lain yang berkepentingan untuk mencapai tujuan bersama di bidang keamanan. Kerjasama keamanan adalah upaya bersama yang penting untuk mencapai tujuan bersama di bidang keamanan. Kerjasama keamanan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan dipengaruhi oleh

berbagai faktor. Kerjasama keamanan memiliki banyak manfaat, namun juga memiliki beberapa tantangan. Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama keamanan perlu terus meningkatkan dialog dan kerjasama untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mencapai tujuan bersama di bidang keamanan. (kumparan.com, 2023)

Tujuannya bisa bermacam-macam, seperti:

a. Menjaga perdamaian dan stabilitas

Ini adalah tujuan utama kerjasama keamanan, yaitu untuk mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai, serta menciptakan lingkungan yang aman dan stabil di kawasan.

b. Mencegah dan menanggulangi ancaman keamanan

Ancaman keamanan bisa bermacam-macam, seperti terorisme, perdagangan narkoba, kejahatan siber, dan bencana alam. Kerjasama keamanan bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman-ancaman tersebut secara efektif.

c. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas keamanan

Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama keamanan dapat saling membantu untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas keamanan mereka, seperti melalui pelatihan bersama, pertukaran informasi, dan pengembangan teknologi keamanan.

d. Mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia

Kerjasama keamanan dapat membantu mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. (Qothrunnada, 2023)

Kerjasama keamanan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Perjanjian bilateral atau multilateral

Perjanjian ini mengatur tentang komitmen negara-negara atau pihak-pihak yang terlibat untuk bekerja sama dalam bidang keamanan.

b. Patroli Bersama

Patroli bersama dilakukan oleh pasukan keamanan dari dua atau lebih negara untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan atau kawasan tertentu.

c. Latihan Bersama

Latihan bersama dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kerjasama antar pasukan keamanan dari dua atau lebih negara.

d. Pertukaran informasi

Pertukaran informasi dilakukan untuk berbagi informasi tentang ancaman keamanan dan upaya penanggulangannya.

e. Bantuan kemanusiaan

Bantuan kemanusiaan diberikan kepada negara-negara yang terkena dampak bencana alam atau konflik.

f. Penelitian dan pengembangan Bersama

Penelitian dan pengembangan bersama dilakukan untuk mengembangkan teknologi keamanan baru dan meningkatkan efektivitas kerjasama keamanan.

g. Pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai

Mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dapat membantu mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai. (Qothrunnada, 2023)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kerjasama Keamanan. Kerjasama keamanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

a. Ancaman keamanan

Ancaman keamanan yang dihadapi oleh negara-negara yang terlibat dalam kerjasama keamanan akan mempengaruhi bentuk dan cakupan kerjasama.

b. Kepentingan nasional

Kepentingan nasional negara-negara yang terlibat dalam kerjasama keamanan akan mempengaruhi tujuan dan arah kerjasama.

c. Kapasitas dan kapabilitas

Kapasitas dan kapabilitas negara-negara yang terlibat dalam kerjasama keamanan akan mempengaruhi efektivitas kerjasama.

d. Kepercayaan antar negara

Kepercayaan antar negara akan mempengaruhi kemauan negara-negara untuk bekerja sama dalam bidang keamanan.

e. Norma dan nilai internasional

Norma dan nilai internasional, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum internasional, akan mempengaruhi prinsip-prinsip kerjasama keamanan. (Qothrunnada, 2023)

Tantangan Kerjasama Keamanan. Kerjasama keamanan juga memiliki beberapa tantangan, antara lain:

a. Perbedaan kepentingan negara-negara yang terlibat

Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama keamanan mungkin memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga dapat menyulitkan untuk mencapai kesepakatan.

b. Kurangnya kepercayaan antar negara

Kurangnya kepercayaan antar negara dapat menghambat kerjasama keamanan.

c. Sumber daya yang terbatas

Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama keamanan mungkin memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga dapat menyulitkan untuk melaksanakan program-program kerjasama.

d. Dinamika ancaman keamanan

Ancaman keamanan terus berkembang dan berubah, sehingga kerjasama keamanan perlu terus diadaptasi agar tetap efektif.

e. Interferensi dari pihak eksternal

Intervensi dari pihak eksternal dapat merusak kerjasama keamanan. (kumparan.com, 2023)

Contoh Kerjasama Keamanan. Berikut adalah beberapa contoh kerjasama keamanan:

a. ASEAN Regional Forum (ARF)

ARF adalah forum keamanan regional yang beranggotakan 27 negara, termasuk Indonesia. ARF bertujuan untuk mempromosikan dialog dan kerjasama dalam bidang keamanan di kawasan Asia Pasifik.

b. Patroli Bersama Indonesia-Malaysia-Thailand (IMTA)

Patroli bersama IMTA dilakukan untuk menjaga keamanan di Selat Malaka dan Selat Singapura.

c. Malabar

Malabar adalah latihan trilateral yang dilakukan oleh angkatan laut India, Amerika Serikat, dan Jepang. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan interoperabilitas antar angkatan laut ketiga negara.

d. Peacekeeping

Indonesia aktif berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di berbagai negara.

Meskipun ada beberapa tantangan, kerjasama keamanan tetaplah penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama keamanan perlu terus meningkatkan dialog dan kerjasama untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

2.1.5 Keamanan Non Tradisional

konsep keamanan non-tradisional (non-traditional security/ NTS) bersifat low politics, karena masalah keamanan lebih diperluas kepada isu-isu yang bersifat multidimensional. Konsepsi keamanan non-tradisional lebih ditekankan pada kepentingan keamanan *non-state actors*. Konsepsi ini menilai bahwa keamanan tidak bisa hanya berfokus dalam perspektif kedaulatan negara dan kekuatan militer saja, melainkan ditujukan kepada upaya menjamin keamanan warga negara atau keamanan manusianya.

Isu keamanan non-tradisional mulai mengemuka pada akhir dekade 1990an ketika sekelompok pakar yang dikenal dengan sebutan mazhab Kopenhagen seperti Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde mencoba memasukkan aspek-aspek di luar kajian keamanan tradisional- seperti misalnya masalah kerawanan pangan, kemiskinan, kesehatan, lingkungan hidup, perdagangan manusia, terorisme, bencana alam, dan sebagainya-sebagai bagian dari studi keamanan. (hi.unida.gontor.ac.id, 2021)

Diantara isu-isu yang diangkat oleh keamanan non-tradisional yaitu sebagai berikut:

- a. Money laundering
- b. Drugs trafficking
- c. Child abuse
- d. Gender
- e. Terrorism
- f. Lingkungan, ekonomi, dll. (hi.unida.gontor.ac.id, 2021)

Contoh Kasus Keamanan Non-Tradisional:

- a. Serangan Siber SolarWinds

Pada tahun 2020, peretas Rusia melancarkan serangan siber besar-besaran terhadap sistem komputer pemerintah dan perusahaan di Amerika Serikat, menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan siber. (Anggoro, 2021)

b. Wabah COVID-19

Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada kesehatan masyarakat, ekonomi global, dan stabilitas sosial di seluruh dunia.

c. Krisis Pengungsi Rohingya

Kekerasan yang dilakukan militer Myanmar terhadap komunitas Rohingya telah menyebabkan eksodus besar-besaran pengungsi ke Bangladesh, menimbulkan krisis kemanusiaan yang kompleks.

Keamanan non-tradisional merupakan tantangan penting bagi hubungan internasional di abad ke-21. Negara-negara perlu bekerja sama secara global untuk mengatasi ancaman-ancaman ini dan membangun ketahanan yang lebih baik terhadap krisis di masa depan.

2.1.6 Cyber Security

Era digital memungkinkan masyarakat merasakan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali di dunia bisnis. Transaksi online sudah jadi hal yang lumrah dan hampir semua orang melakukannya. Namun, hal ini juga dibarengi oleh ancaman siber yang berpotensi merugikan pengguna. Risiko seperti pencurian data, akses ke informasi sensitif hingga perusakan data-data penting harus diperhatikan setiap pebisnis untuk menjamin keamanan data pelanggannya.

Keberadaan *e-payment* pada sistem transaksi pembayaran digital yang saat ini jadi tren bukanlah pengecualian, bahkan seharusnya menjadi perhatian utama bagi pebisnis. Risiko kebocoran data serta penggelapan saldo rekening digital cukup untuk menjadi ancaman besar. Di sinilah *cyber security* menjadi penting untuk diterapkan di seluruh sistem transaksi online (midtrans.com).

Cyber security berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yakni *cyber* yang artinya dunia maya (internet) dan *security* yang artinya keamanan. Secara istilah, *cyber security* merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet. Ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak hingga data yang kamu miliki. Praktik *cyber security* dilakukan tidak hanya oleh individu, tapi juga oleh perusahaan dan instansi. Langkah ini akan membantu melindungi pusat data dan sistem komputerisasi lainnya dari akses yang tidak sah.

Strategi keamanan siber yang mumpuni bisa memberikan perlindungan keamanan yang baik terhadap serangan yang dirancang untuk mengakses, mengubah, menghapus atau memeras sistem dan data sensitif dari pengguna. Keamanan *cyber* juga berperan dalam mencegah serangan yang bertujuan untuk mengganggu atau bahkan menghentikan operasi sistem maupun perangkat (Dicoding Intern, 2023).

Cyber Security ada beberapa jenis yaitu:

a. *Network Security*

Ini melibatkan penerapan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengamankan jaringan komputer dari akses tidak sah, penyusup,

serangan, gangguan, dan penyalahgunaan. Keamanan ini membantu organisasi melindungi asetnya dari ancaman eksternal dan internal.

b. Application Security

Ini melibatkan perlindungan perangkat lunak dan perangkat dari ancaman yang tidak diinginkan. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan terus memperbarui aplikasi untuk memastikan mereka aman dari serangan. Keamanan yang sukses dimulai dari tahap desain, penulisan kode sumber, validasi, pemodelan ancaman, dll., sebelum program atau perangkat dikerahkan.

c. Information or Data Security

Ini melibatkan penerapan mekanisme penyimpanan data yang kuat untuk menjaga integritas dan privasi data, baik dalam penyimpanan maupun dalam transmisi.

d. Identify management

Ini berkaitan dengan prosedur untuk menentukan tingkat akses yang dimiliki setiap individu dalam organisasi.

e. Operational Security

Ini melibatkan proses dan pengambilan keputusan tentang penanganan dan pengamanan aset data.

f. Mobile Security

Ini melibatkan pengamanan data organisasi dan pribadi yang disimpan pada perangkat *mobile* seperti ponsel, komputer, tablet, dan perangkat serupa lainnya terhadap berbagai ancaman jahat. Ancaman-ancaman ini

adalah akses tidak sah, kehilangan atau pencurian perangkat, *malware*, dan lain-lain.

g. *Cloud Security*

Ini melibatkan dalam melindungi informasi yang disimpan di lingkungan digital atau arsitektur *cloud* untuk organisasi. Ini menggunakan berbagai penyedia layanan cloud seperti AWS, Azure, Google, dll., untuk memastikan keamanan terhadap berbagai ancaman.

h. *Disaster Recovery and Business Continuity Planning*

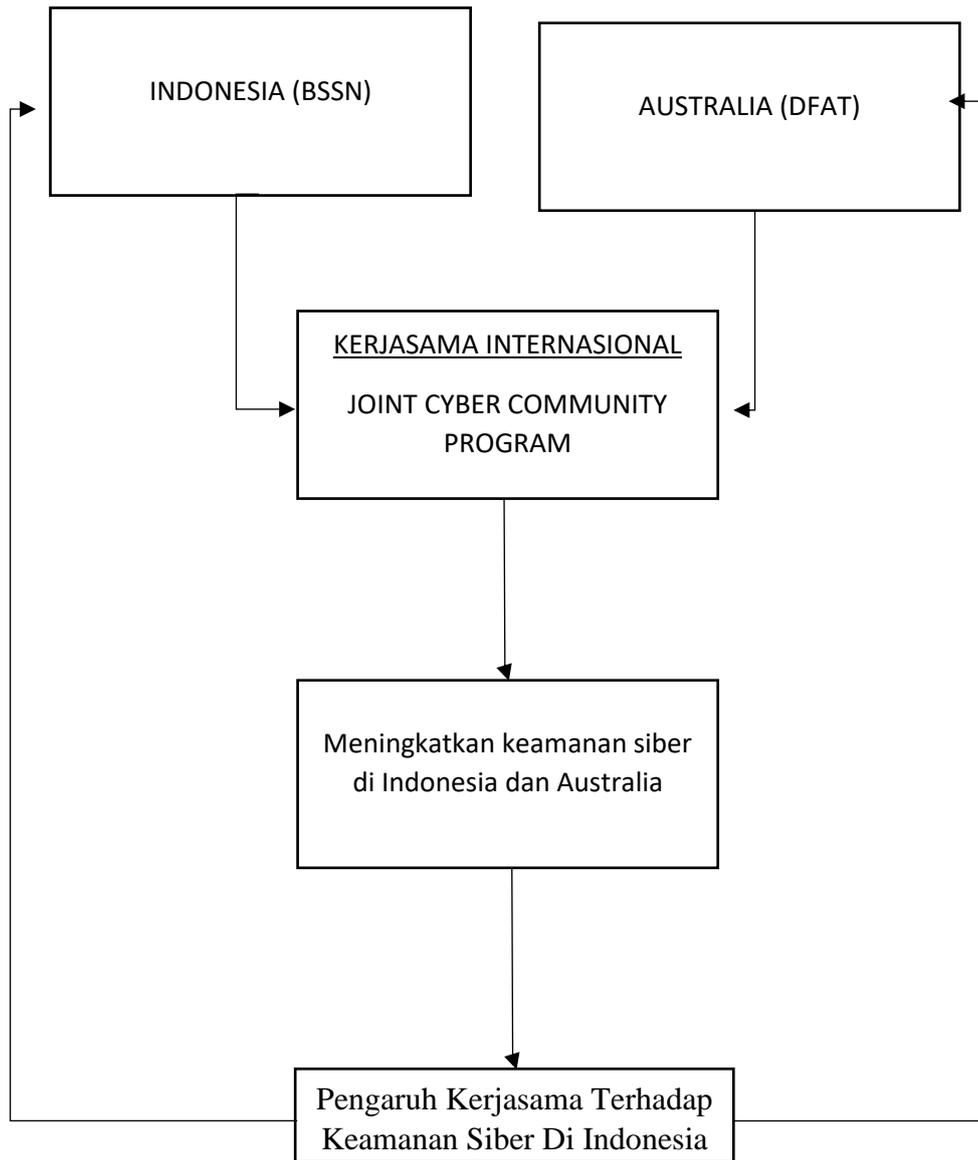
Ini berkaitan dengan proses, pemantauan, peringatan, dan rencana tentang bagaimana organisasi merespons ketika aktivitas jahat menyebabkan kehilangan operasi atau data. Kebijakannya menentukan memulihkan operasi yang hilang setelah bencana terjadi ke kapasitas operasional yang sama seperti sebelum kejadian.

i. *User Education*

Ini berkaitan dengan proses, pemantauan, peringatan, dan rencana tentang bagaimana organisasi merespons ketika aktivitas jahat menyebabkan kehilangan operasi atau data. Kebijakannya menentukan memulihkan operasi yang hilang setelah bencana terjadi ke kapasitas operasional yang sama seperti sebelum kejadian. (Dicoding Intern, 2023).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dimaksudkan untuk memberikan alur pemikiran penulis dalam menjelaskan pokok permasalahan dari penelitian yang bertujuan untuk menegaskan, meyakinkan, dan menggabungkan teori-teori dengan masalah yang telah dibahas. Penelitian mengambil batas waktu 2018-2024. Penelitian ini meneliti tiga variabel, yaitu kerjasama keamanan Siber Indonesia dan Australia, kerjasama kedua negara dalam mengatasi ancaman Siber, serta upaya meningkatkan kerjasama dalam menghadapi tantangan keamanan Siber melalui program *Joint Cyber Community Program*. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana kerjasama antar negara dapat mengatasi ancaman Siber, dengan harapan dapat memperkuat keamanan Siber dan ketahanan digital di kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang bermanfaat bagi upaya peningkatan kerjasama internasional dalam mengatasi ancaman Siber di era digital. Penelitian ini juga menjelaskan Kerjasama antara Indonesia dan Australia melalui *Joint Cyber Community Program* dalam meningkatkan keamanan siber di Indonesia dan Australia dan yang menjadi fokus peneliti adalah bagaimana pengaruh kerjasama tersebut terhadap keamanan siber di Indonesia.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran